

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU DI KOTA MAKASSAR
(DPC PERADI)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

Nur Firman

NIM: 10500113069

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI KOTA MAKASSAR studi kasus (DPC PERADI)", yang disusun oleh Nur Firman, NIM 10500113069, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1439 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dengan beberapa perbaikan.

Samata, 30 Agustus 2018M
18 Dzulhijjah 1439H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Istiqamah, S.H., M.H | (.....) |
| Munaqisy I | : Rahman Syamsuddin, SH., MH. | (.....) |
| Munaqisy II | : Ashar Sinilele, S.H., MH. | (.....) |
| Pembimbing I | : Ashabul Kahpi, SH., MH. | (.....) |
| Pembimbing II | : Irfan, S.Ag., M.Ag | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Firman
Nim : 10500113069
Tempat/Tgl. Lahir : Bontorannu, 07 Mei 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Tamangapa Raya no. 211
Judul : Peran Advokat dalam memberikan pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Makassar (studi kasus DPC PERADI)

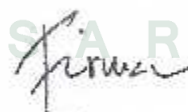
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDIN
M A K A S S A R

Makassar, 30 Agustus 2018

Penyusun,



Nur Firman

NIM : 10500113069

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Studi Kasus DPC PERADI)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku pimpinan tertinggi beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamduddin, M.Ag. selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Irfan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H selaku Penguji I, Ashar Sinilele, S.H., M.H selaku penguji II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.
4. Ibu Istiqamah, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya program studi Ilmu Hukum.
7. Kakanda-kakanda dan Dinda semuanya yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan kawan-kawan Mahasiswa Nasional, khususnya Jurusan Ilmu Hukum; Mediator 2013, Independent Law Student (ILS) Indonesia, KKN Angkatan 54 dan Zarindah Institute.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, Dan juga kepada saudara seperjuangan mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 29 Agustus 2018

Penyusun

NUR FIRMAN
NIM.10500113069

5. Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum khususnya program studi Ilmu Hukum.
7. Kakanda-kakanda dan Dinda semuanya yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan kawan-kawan Mahasiswa Nasional, khususnya Jurusan Ilmu Hukum; Mediator 2013, Independent Law Student (ILS) Indonesia, KKN Angkatan 54 dan Zarindah Institute.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

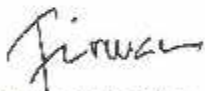
Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta. Dan juga kepada saudara seperjuangan mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 29 Agustus 2018

Penyusun


NUR FIRMAN
NIM.10500113069

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 7 |
| A. Tinjauan Umum tentang Advokat | 7 |
| B. Peran dan Fungsi Advokat | 12 |
| C. Tugas Advokat | 14 |
| D. Hak dan Kewajiban Advokat | 15 |
| E. Kode Etik Advokat | 20 |
| F. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia | 23 |
| G. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Pendekatan Penelitian | 44 |
| C. Sumber Data | 45 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| E. Instrumen Penelitian | 45 |
| F. Teknik Analisis Data | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian | 47 |
| 1. Sejarah Singkat PERADI | 47 |
| B. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Tidak Mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar | 50 |
| C. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum | |

| | |
|---|----|
| Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar | 57 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |



ABSTRAK

Nama : Nur Firman

Nim : 10500113069

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi)

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (Dpc Peradi). Seringnya terjadi tindak kriminalitas yang menjadi pelakunya rata-rata dari kalangan ekonomi rendah, atau pendidikan yang rendah.

Dari latar belakang masalah yang terjadi, penulis mencoba mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar dan Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode yaitu : 1) Pendekatan kasus dan Undang-Undang di Dpc Peradi cabang kota Makassar, 2) Wawancara dengan Advokat di Dpc Peradi cabang kota Makassar, 3) Analisis data. Yaitu penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis, penulis menemukan bahwasanya efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di DPC Peradi Cabang Makassar yaitu advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat tersebut, dan juga peneliti berhasil mengidentifikasi bahwasanya hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di Dpc Peradi Cabang Makassar yaitu dimana masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang.

Implikasi dalam penelitian ini adalah advokat harus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan *alinea pertama* menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan

lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan

hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.”¹

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:²

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

¹Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta Selatan : 2013) h.12.

²Undang-Undang Republik Indonesia No.18Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4288.

- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap seorang Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar. Karena kasus pendampingan hukum terhadap

masyarakat yang tidak mampu sangat jarang didampingi oleh seorang Advokat terlepas dari kasus Prodeo. Advokat dalam hal ini di atur dalam UU No. 18 tahun 2003 dan Bantuan hukum Cuma-Cuma ini diatur dalam UU No. 16 tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber juga rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melalui perenungan panjang dari masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan berbagai karya referensi yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :

Theodorus Yosef Parera dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan Penegakan Hukum” yang menjelaskan berbagai hal tentang penegakan hukum dan implikasi tantangan ganda yang harus dihadapi oleh seorang Advokat. Menjelaskan mengenai profesi Advokat, seperti makna profesionalisme seorang Advokat, tugas mulia untuk menjaga kesetaraan kekuatan dalam peradilan dan prinsip-prinsip moral yang relevan bagi penegakan hukum.

Shulhah Nurul Laily, skripsinya “Advokat Indonesia dalam perspektif hukum islam” lebih membahas pada etika dan profesi Advokat di Indonesia.

Nurdin dalam skripsinya yang berjudul “Bantuan hukum menurut hukum positif dan hukum islam” peneliti membandingkan dua produk hukum yang ada di Indonesia. Dalam hukum positif bantuan hukum di tekankan pada klien yang tidak mampu membayar jasa Advokat. Dalam hukum islam menekankan pada kewajiban Advokat dalam membela klien dalam persidangan untuk memperoleh keadilan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (prodeo) oleh Advokat Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan penyelesaiannya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Kota Makassar.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Sejarah dan Defenisi Advokat

a. Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia

Secara garis besar organisasi advokat di Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga periode penting. Periode pertama merupakan periode awal, yaitu kelahiran dan perintisan organisasi hukum di Indonesia. Periode kedua adalah periode dimana organisasi advokat di Indonesia mengalami krisis akibat maraknya intervensi dari pemerintah serta konflik antar organisasi advokat.

1.) Periode Awal Terbentuknya Organisasi Advokat di Indonesia

Bermula dari masa kolonialisme, pada masa tersebut jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya pun terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *landraad* dan *raad van justitie*, Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang dikenal sebagai “*Balivan Advocaten*” adapun praktisi hukum ini umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang merupakan warga pribumi asli.⁷

Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di Indonesia, dan baru pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang, dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamai dengan “*Balie*” yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal lainnya seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

⁷ Binziad Kadafi dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK Jakarta 2001. h. 361.

Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yaitu dalam kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo.

2.) Masa Krisis Organisasi Advokat Indonesia

Beberapa anggota PERADIN yang sudah menikmati keamanan material yang mereka peroleh sejak pemerintahan Orde Baru sampai merasa perlu untuk mengundurkan diri dari PERADIN dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI). Namun yang paling fatal dari resolusi tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintahan terhadap PERADIN. Dukungan moril yang pernah diberikan pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali.

Ditambah lagi gejala berpalingnya pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) oleh Albert Hasibuan pada tahun 1979. yang kemudian muncul satu persatu organisasi-organisasi lain yang juga berperan sebagai organisasi advokat. Seperti, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat). dan Bina Bantuan Hukum (BBH). Keadaan ini menjadikan kondisi keadvokatan di Indonesia menjadi buruk. Banyaknya organisasi advokat yang ada, perlahan menurunkan kewibawaan PERADIN yang kemudian juga diikuti pula menurunnya kewibawaan praktisi hukum.

Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi peleburan PERADIN dan organisasi advokat lainnya kedalam wadah tunggal yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Namun PERADIN tidak serta merta menyetujui inisiatif ini. Mereka mencurigai bahwa ini adalah satu plot untuk menempatkan advokat dibawah kontrol Pemerintah.

3.) Masa Rekonsolidasi dan Reformasi

Pada tahun 1995, pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta bagi ketiga organisasi advokat (IKADIN, AAI dan IPHI). Hasil dari seminar tersebut adalah kode etik bersama yang kemudian diadopsi oleh ketiga organisasi tersebut yang kemudian di bawah payung Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). kemudian ketiga organisasi itu pun mencapai kemajuan yang signifikan.

pada tahun 1998 Mahkamah Agung menyetujui mengadopsi kode etik FKAI untuk dipergunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. Pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Dengan ini FKAI telah menunjukkan sinyal rekonsolidasi dan membuka kemungkinan bagi organisasi advokat untuk kembali berkembang di masa yang akan datang.

Namun upaya tersebut rupanya kembali terhambat, IKADIN yang mendadak mencabut keanggotaannya dalam Piagam Forum Komunikasi dan tidak mengakui FKAI. IKADIN kemudian menarik diri dari FKAI dan kembali memberlakukan kode etiknya sendiri serta meninggalkan kode etik bersama FKAI. Tanpa IKADIN, FKAI terus berjalan dan pada saat itu kode etik diurus oleh AAI dan IPHI sampai pada tahun 2001 dan pada saat itu IKADIN belum pernah mengadakan ujian kode etiknya sendiri.²

2. Defenisi Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu

² Binziad Kadafi dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK Jakarta 2001. h. 365.

seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.³

Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah penasehat hukum.⁵ Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

³ Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 2.

⁴Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57.

⁵Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h. 1.

Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan S.H. mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.⁶

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁷

Menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat berasal dari kata latin yaitu *advocare* yang berarti: seseorang yang membantu, mempertahankan, membela, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Selanjutnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat dalam pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

⁶Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 6.

⁷ Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dijelaskan definisi Advokat. Adapun yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka Advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa Advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut Advokat bukan lagi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Lain halnya dengan Luhut M. P. Pangaribuan yang menjelaskan bahwa definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.

B. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi advokat di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di pengadilan dan di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat.

Secara normatif, Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*).

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu⁸:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanya berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebetulnya masih terdapat begitu banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut dengan pekerjaan non-litigasi yang meliputi pemberian pelayanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela dan melindungi hak asasi manusia.⁹

⁸Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240 : 2005)

⁹Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011) h. 20.
C.S.T. Kancil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) H. 58.

Bentuk bantuan non litigasi lain yang diatur adalah penyuluhan hukum; investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi; negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

Pekerjaan non-litigasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan tugas *socilitor*, yaitu mereka yang dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tetapi tidak tampil di pengadilan. Agak mirip dengan hal ini, fungsi advokat di Amerika Serikat dapat dibagi ke dalam tiga jenis: advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan; advokat sebagai penasihat; advokat sebagai juru runding.

C. Tugas Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.¹⁰

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi yang wajib melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali. Advokat tidak bisa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, kaya-miskin, keyakinan politik dan gender. Profesi

¹⁰C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) H.58.

advokat ini meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan.¹¹

Advokat sebagai profesi mulia yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada Kemandirian, Kejujuran, kerahasiaan, dan Keterbukaan.¹² Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadilan, jaksa dan kepolisian. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat terkhusus pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

D. Hak dan kewajiban advokat

1. Hak seorang Advokat

¹¹ Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011) h. 20.

¹² Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010) h. 96.

Dalam kehidupan ber-sosial, kita tidak dapat melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan profesi advokat, sebagai salah satu elemen penting dalam penegak hukum di Indonesia, advokat juga memiliki hak dan kewajiban. Ada banyak hak yang disebut oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 yang dituangkan pada Bab IV dengan Title hak dan kewajiban.

a. Hak kebebasan dan kemandirian (independen)

Hak kebebasan dan kemandirian diatur dalam pasal 14 dan 15, yang merumuskan sebagai berikut :

Pasal 14 “ *Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*”

Pasal 15 “*Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*”

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

b. Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat 2, sebagai berikut :

Pasal 16 “ *Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.*”

Pasal 18 “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien nya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.”

c. Hak meminta informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien), hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut :

Pasal 17 “*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*”

d. Hak ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan –keberatannya dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap perkara yang di belanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari , mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya dianggap sebagai terdakwa yang untuk mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.

e. Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia

Hak ini sangat luas, bila dibandingkan dengan para penegak hukum lainnya, seperti contoh hakim pengadilan tingkat pertama tidak boleh mengadili perkara pada pengadilan tingkat kedua. Demikian juga penegak hukum lainnya. Hal ini diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, sebagai berikut :

“wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara republik Indonesia.”

f. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa, penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut :

“ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasannya pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “ advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

g. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi

Dalam menjalankan jasa hikum, seorang advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat

7: *“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat kesepakatan dengan klien.”*

Kemudian pada Bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut :

1. *Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.*
2. *Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”*

Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat-surat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.

h. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri maupun hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan klien kepadanya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain, bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain.

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 pada pasal 19 dirincikan sebagai berikut :

1. *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
2. *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.*

i. Hak memberikan somasi

Somasi adalah salah satu yang biasa yang dilakukan seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

j. Hak membuat legal coment atau legal opinion.

2. Kewajiban seorang advokat

- a. Menjunjung kode etik profesi (pasal 26 UU No. 18/2003)
- b. Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia (UU. No.18 tahun 2003 dan Bab II pasal 2 Kode Etik Advokat)
- c. Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan. (pasal 4 huruf I, j dan k kode etik advokat).
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang (pasal 19 (1) UU No. 18 tahun 2003).
- e. Menghormati lembaga peradilan sebagai *officer of the court* dan segala perangkat didalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran.(Pasal 218 KUHAP)
- f. Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat. (pasal 4 ayat 3 poin 5 UU No. 18 tahun 2003)

- g. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. (pasal 6 ayat 3 UU No. 18 tahun 2003)
- h. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. (pasal 4 ayat 3 UU No. 18 tahun 2003)
- i. Member bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu.(pasal 22 UU No. 18 tahun 2003)
- j. Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 25 UU No. 18 tahun 2003).¹³

E. Kode etik advokat

1. Pengertian Kode Etik Advokat

Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain :

- a. Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya).
- b. Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral.

¹³A Sukris Sarmadi, MH, Advokat litigasi dan non litigasi pengadilan, Bandung : Mandar maju, 2009, hlm. 59-76

- c. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.¹⁴

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat:

- a. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.
- b. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.
- c. Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁵

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.

¹⁴<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia> tgl 23 feruari 2018/

¹⁵<http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html> tgl 23 feruari 2018

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.

2. Fungsi serta peran dari kode etik advokat

Fungsi Kode Etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”.

Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan:

- a. Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,
- b. Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,
- c. Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil,
- d. Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat,
- e. Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.¹⁶

¹⁶<http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011/04/kode-etik-advokat.html> tgl 23 februari 2018

Ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis
- c. Melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi.

F. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹⁷

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam

¹⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O.¹⁸ Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.¹⁹ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

¹⁸Abdurrahman,Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Cendana Press, 1983), hlm. 40.

¹⁹Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 2.

3. Golongan Bumi putera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli(pribumi).²⁰

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing system peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku Reglement op de Rechtsvordering (Rv) untuk acara perdatanya dan Reglement op de Strafvoordering (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi

²⁰Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari <http://id.wikipedia.or>

Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, baik untuk acara perdata maupun acara pidanaanya.

Apabila diperbandingkan, *HIR* memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban legal *representation by a lawyer (verplichte procureur stelling)*, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.²²

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya,

²¹Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, Op. cit., hlm. 21.

²²Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 3.

pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).²³

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di

²³Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 26.

Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution,²⁴ yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970.²⁵ Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).²⁶ Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

²⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009), hlm.16.

²⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Cendana Press, 1983), hlm.50.

²⁶ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 50.

G. Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma

1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal aid yaitu Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma- cuma, baik di dalam Pengadilan maupun di luar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁷

a. UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

b. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, mendefinisikan bahwa: Bantuan Hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, Bantuan Hukum tidak disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya menyebut bentuk

²⁷Supriadi, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum* (Yogyakarta : Arsita, 2001) h. 333

Bantuan Hukum atau fungsi Bantuan Hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tidak terdapat definisi khusus mengenai Bantuan Hukum dalam undang-undang ini, yang ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) menyatakan “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

b. UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial

Dalam Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial, Bantuan Hukum dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, yang mana dalam Pasal tersebut “Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”

c. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tidak ada definisi khusus mengenai Bantuan Hukum dalam undang-undang ini, hanya dalam Pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Bantuan Hukum dan seperkara pidana seorang tersangka

sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat.

- d. PP No. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma .

Pasal 1 ayat (3) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokattanpa menerima pembayaran honorarium. meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 ayat (4) “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

2. Dasar Hukum mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Adapun undang - undang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma yaitu undang-undang :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Didalam undang-undang ini yang mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma yaitu Pasal 54, 56 ayat (1), dan 56 ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 ayat (1) “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Pasal 56 ayat (2) “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma – Cuma”.

b. Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam Undang-undang ini mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma diatur didalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 22 ayat (2) “ketentuan mengenai prasaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”

c. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah Pasal 37 samapi Pasal 39. Yang dimana menurut penulis adalah dasar

hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Adapun penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.

Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”.

Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Tetapi menurut hemat penulis, Dalam undang-undang ini belum terlalu signifikan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, atau dalam arti di undang – undang ini pemerintah belum terlihat berperan serta dalam hal Bantuan Hukum, khususnya Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

d. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini merupakan pengganti undang – undang yang lama yaitu undang-undang NO. 4 Tahun 2004.

Tentu isi undang-undang yang baru mengenai kekuasaan kehakiman ini terlihat lebih rinci mengenai aturan Bantuan Hukum. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara cuma- cuma. Adapun Pasal-Pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum yaitu, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.

Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”.

Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

e. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu . yang dimana didalam Pasal ini yang memuat aturan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerima nBantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang-undang tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.

Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Pasal 6 ayat (1) “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.

Pasal 6 ayat (2) “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini”.

Pasal 8 ayat (1) “() Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pasal 8 ayat (2) “Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- berbadan hukum;
- terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ;

- memiliki pengurus; dan
 - memiliki program Bantuan Hukum.
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Pasal-Pasal yang menjadi acuan pengaturan seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut :

Pasal 2 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”.

Pasal 3 ayat (1) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

Pasal 3 ayat (2) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”.

Pasal 4 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 10 “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.

3. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Terdapat dua aspek tujuan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu :

a. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat yang notabenenya adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.²⁸

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.²⁹

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

²⁸Tim Di Bawah Pimpinan : Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun : 2011) h. 21.

²⁹Tim Di Bawah Pimpinan : Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat* h. 22

- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan, terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Kewajiban memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan Bantuan Hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan Hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).

Dalam penjelasan Undang-undang No 16 tahun 2011 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi

kemasyarakatan yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam implementasinya Undang-undang No 16 tahun 2011 ini menjelaskan bahwa pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-cuma terdiri dari dua jenis layanan Bantuan Hukum, yaitu pemberi Bantuan Hukum *litigasi* dan *non litigasi*.³⁰

Pemberian Bantuan Hukum secara *litigasi* dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

5. Penerima Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

Pasal 28D Ayat UUD 45 (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan

³⁰Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. H. 3.

tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dari beberapa definisi mengenai Bantuan Hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 mengenai penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma diatur di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (1), yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Pasal 4 ayat (1) “Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”.

Pasal 4 ayat (2) “ Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.

Pasal 5 ayat (1) “ Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa

menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam Bantuan Hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. penerima Bantuan Hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Bantuan Hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
- c. Bantuan Hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma.

6. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma diatur didalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5). UU No. 16 Tahun 2011. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah :

Pasal 14 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon

Bantuan Hukum”

Pasal 14 ayat (2) “Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”.

Pasal 15 ayat (1) “Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum”.

Pasal 15 ayat (2) “Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum”.

Pasal 15 ayat (3) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum”.

Pasal 15 ayat (4) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan”.

Pasal 15 ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”

PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 4 ayat (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 4 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum”.

Pasal 4 ayat (3) “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5 “Permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan”.

Pasal 6 ayat (1) “Dalam hal Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

H. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Kurang Mampu

1. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Hak Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian di DPC PERADI Kota Makassar, karena lokasi penelitian tersebut relevan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris.

Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari wawancara guna menjawab permasalahan penelitian serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat. Penelitian ini mengenai “Peran Advokat dalam memberikan pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang tidak mampu di Kota Makassar” ini tetap bertumpu pada premis Normatif, dimana objek kajian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tentang Bantuan Hukum yaitu UU Nomor 16 Tahun 2011 serta UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi

Advokat sebagai landasan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat.

C. *Sumber Data*

Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan advokat yang pernah memberikan bantuan hukum prodeo. Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.

D. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara atau interview, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Advokat yang pernah memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di Kantor PERADI Cabang Makassar mengenai permasalahan diatas.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian:

1. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis bahan-bahan yang telah ditulis sebelumnya diatas kertas.
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hasil penelitian, seperti laptop, flashdisk, hp yang telah dikumpulkan baik secara manual maupun online.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴ Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PERADI

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara pengenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum

Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili.

Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAJ adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani dan melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

B. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Oleh Advokat Di PERADI Cabang Makassar.

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain: Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan; Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun

2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat kota Makassar dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang

berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap professional tidak membedakan kliennya.

Hasil wawancara dengan bapak Djamil Misbach, ketua DPC PERADI cabang Makassar yang mengatakan bahwa kami mewajibkan kepada setiap advokat yang bernaung di DPC Peradi Makassar ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma dengan berdasar kepada aturan yang berlaku.¹

Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya diskriminasi terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merumuskan:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa seorang advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu yang lagi membutuhkan bantuan hukum untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat yang telah diberikan pelayanan bantuan hukum tersebut.

¹ Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa :“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu, dalam :

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima tahun) yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan yang diatas segel dan diketahui pengadilan dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu

dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Hasil wawancara dengan bapak Djamil Misbach, ketua DPC PERADI cabang Makassar yang mengatakan bahwa kami melayani pemohon bantuan hukum mulai dari mereka mendaftarkan diri dan mendampingi lien sampai ketahap persidangan hingga selesai.²

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang di berikan kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah putus mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Hasil wawancara dengan bapak Djamil Misbach, ketua DPC cabang Makassar yang mengatakan bahwa advokat tidak hanya memberikan jasa pelayanan bantuan hukum didalam persidangan juga, akan tetapi memberikan pelayanan bantuan hukum di luar persidangan juga jika ada yang membutuhkan, maka kami akan siap membantu.³

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2013,

²Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

³Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Heryansyah Sobirin, S.H.,M.H selaku Advokat, beliau mengatakan dalam memberikan bantuan hukum baik itu secara professional maupun secara prodeo tidak boleh ada diskriminasi, seorang advokat tidak boleh membedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam mendampingi klien tersebut. Sudah jelas seorang Advokat dalam menjalankan profesinya terikat kepada Undang-Undang dan kode etik advokat. Hal ini untuk menjaga nama baik profesi advokat di mata masyarakat dalam memberikan bantuan hukum, sehingga profesi mulia ini tentu saja menjadi harapan bagi penegakan hak-hak masyarakat atas hukum dapat terpenuhi.⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwasanya advokat dalam memberikan bantuan hukum khususnya secara prodeo tidak boleh mendiskriminasikan salah satu pihak dalam perkara tersebut, agar citra masyarakat terhadap advokat dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan harapan dan penegakan hukum bias berlaku adil.

Wawancara selanjutnya dengan Hendra Firmansyah, S.H.,M.H bahwa seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara Cuma-Cuma. Seorang advokat yang menangani kasus secara Cuma-Cuma harus

⁴ Hasil wawancara dengan Heriansyah Sobirin S.H.,M.H tanggal 19 April 2018

betul-betul murni dan sepuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.⁵

Dari wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat harus betul-betul murni dari diri advokat sendiri untuk tegaknya hukum. Dan masalah advokat di identik dengan uang haruslah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum baik itu melalui sosialisasi tentang bantuan hukum agar masyarakat bias paham akan bantuan hukum oleh hukum oleh advokat bukan hanya persoalan uang.

Data yang penulis peroleh di lapangan yang lakukan di Kantor DPC PERADI wilayah Sulawesi Selatan, bahwa sepanjang tahun 2015 hingga sekarang, advokat si DPC PERADI wilayah Sulawesi Selatan sudah menerima berbagai jenis pengaduan kasus. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 selalu terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh advokat wilayah Sulawesi Selatan. Tahun 2015 sebanyak 40 kasus, tahun 2016 sebanyak 60 kasus dan jumlah kasus pada tahun 2017 yang di terima, dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Hasil Wawancara dengan Hendra Firmansyah, S.H.,M.H tanggal 9 April 2018

TABEL
JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH
DPC PERADI WILAYAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

| No | NAMA KLIEN | PASAL YANG KENAKAN | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Andri Wanto Rombe | Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana | Amar putusan 6 bulan |
| 2. | Andi Muh Taufan | UU no.23 tahun 2004 tentang kdrt/pasal 351 ayat (1) KUH Pidana | Amar putusan 1 tahun 3 bulan |
| 3. | Sulaiman Bin Sirajuddi n | Pasal 2 ayat 1 uu darurat No. 12 thn 1951 | Amar putusan 5 bulan 15 hari |
| 4. | Dg. Ati | Pasal 44 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga | Amar putusan pidana penjara 4 bulan 15 hari |
| 5. | Lalu Prasjabudi | Pasal 49 Huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 | Amar putusan 5 bulan |
| 6. | Dandi | Pasal 363 ayat 1 | Amar putusan 8 bulan 20 hari |
| 7. | Kamaruddin | Pasal 363 ayat 1 | Amar putusan 1 tahun 2 bulan |

Sumber data: Dokumen DPC PERADI Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017.

Djamil Misbach, S.H.,M.H selaku ketua DPC PERADI, mengatakan bahwa banyak kasus yang di tangani pada tahun 2017 sampai dengan 2018 ini, baik itu kasus Pidana maupun kasus Perdata, tetapi selain dari yang tercantum pada tabel tersebut masih ada yang dalam proses penanganan perkara, baik itu penanganan perkara Pidana maupun Perdata.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan salah satu contoh kasus dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh Advokat di DPC PERADI wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu Kasus yang menimpa Perempuan dengan nama **DG. ATI** lahir di Makassar, umur 56 tahun beralamat di jalan pampang Utama Lr 1 kota Makassar yang dituntut telah melakukan tindak pidana **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 Ayat (1) UU .RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus Dg.Ati ini di wilayah Sulawesi Selatan melibatkan 18 Pengacara untuk mendampingi dan melakukan pembelaan hukum mulai dari tingkat Penyidikan di kepolisian, Kejaksaan dan sampai pengadilan yang dimana dalam Surat Perintah Penahanan di Kepolisian diduga telah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dikuatkan oleh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang sama serta Surat Tuntutan dengan bunyi menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa Dg. Ati dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Kemudian para Advokat di DPC PERADI menjawab dengan Nota Pembelaan (PLEDOI) yang isi pembelaannya berkesimpulan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Dg. Ati ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa telah berumur 56 tahun dan lanjut usia, mulai merasakan sakit-sakitan hingga Terdakwa membutuhkan perawatan yang rutin dari pihak keluarga atau medis, dan juga Para advokat DPC PERADI bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan hati nurani hingga sisi kemanusiaan, agar terdakwa dapat berkumpul kembali dengan keluarganya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya perkara pidana yang menimpa perempuan dengan nama Dg. Ati setelah melalui proses persidangan akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Perempuan Dg. Ati ini dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Dg. Ati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karna itu dengan Pidana penjara selama 4 (bulan) 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah panci masak, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua ribu Rupiah)

Berdasarkan Amar Putusan Hakim tersebut maka perempuan dengan nama Dg. Ati ini tinggal menjalani hukuman 6 (hari) penahanan lagi sebelum bebas dikarenakan pemotongan masa tahanan yang telah dijalani dan oleh putusan ini para Advokat di DPC PERADI tidak melakukan Tindakan Banding.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Oleh Advokat Di PERADI Cabang Makassar.

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses dan mendapatkan keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang masih menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke PBH juga karena image advokat di mata masyarakat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahal nya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang di berikan oleh seorang Advokat menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pihak penyidik sebenarnya sudah menyampaikan hak terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik yang menyediakan sendiri maupun disediakan oleh penyidik sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya baik masyarakat itu sendiri merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalannya proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang dilalui. Apabila tersangka setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri, penyidik akan langsung membuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk dilampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan selanjutnya menurut Hendra Firmansyah, S.H.,M.H adalah persoalan dana. Hampir sebagian dari Advokat yang menangani kasus Prodeo, merasa terbebani dengan anggaran dana yang mereka peroleh setelah perkara selesai, dalam arti jika seorang Advokat menangani perkara secara prodeo, maka segala pengeluaran dana mulai dari pendampingan tersangka di tingkat penyidikan hingga putusan akhir bersumber dana Advokat itu sendiri, hal ini yang menjadi salah satu alasan Advokat

bersikap diskriminasi terhadap pendampingan perkara penerima bantuan Hukum Prodeo.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, persoalan dana masih menjadi salah satu alasan seorang Advokat melakukan diskriminasi terhadap klien. Dana yang menjadi alasan utama dalam memberikan bantuan hukum membuat citra advokat di mata masyarakat yang masih kurang paham akan bantuan hukum itu sendiri menjadi buruk.

Hasil wawancara dengan bapak Djamil Misbach, ketua DPC cabang Makassar yang mengatakan bahwa hambatan yang sering dihadapi yaitu adanya orang-orang yang bukan advokat tetapi menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan hukum, sebutannya itu makelar. Makelar ini memanfaatkan kondisi untuk meminta biaya kepada klien dengan dalih dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara sedangkan sampai diadvokatnya yang mereka katakan malah katanya klien ini dari masyarakat yang kurang mampu.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatannya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat, namun menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klien dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan mereka untuk mengambil untung lebih. Mereka menarik sejumlah

⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Firmansyah, S.H.,M.H tanggal 9 April 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

biaya kepada klien dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara, namun dia mengatakan pada advokat bahwa calon kliennya ini kurang mampu dan diharapkan mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Uang yang sudah berada ditangan mereka dimanfaatkan sendiri. Selanjutnya persoalan dana yang menjadi salah satu alasan Advokat sendiri untuk perkara bantuan hukum prodeo sampai sekarang masih menjadi hal yang utama.

Hasil wawancara dengan bapak H. Djamil Misbach, S.H., M.H, ketua DPC cabang Makassar yang mengatakan bahwa hambatan lain yang sering terjadi yaitu dimana pemberi pelayanan bantuan hukum dengan pemohon pelayanan bantuan hukum tidak seimbang jumlahnya, dimana pemohon banyak yang dari daerah daerah pelosok yang susah dijangkau sedangkan para advokat sendiri berkantor di kota-kota besar.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat. Penyebarannya yang tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa yang minim pengetahuannya tentang bantuan hukum yang di berikan oleh advokat tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini

Hasil wawancara dengan bapak H. Djamil Misbach, S.H., M.H, ketua DPC cabang Makassar yang mengatakan bahwa kadang ada juga yang kami dapati

⁸ Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

masyarakat yang memalsukan surat-surat keterangan tidak mampu dan berpura-pura miskin yang dimana mereka mengenakan pakaian seperti orang yang kurang mampu, jadi kami harus berhati-hati dalam memilah mana kah yang sebenarnya masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan pelayanan secara cuma-cuma.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakatnya sendiri. Beberapa kali ditemui mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke PBH ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo.

Advokat sendiri tidak bisa memaksa masyarakat yang memerlukan bantuan hukum untuk datang ke PBH. Namun Advokat terutama yang berada dibawah naungan PERADI Makassar terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak perlu ragu meminta bantuan hukum cuma-cuma kepada advokat.

Kebijakan PERADI terhadap anggotanya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan semangat kerja dari Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar. Bagi advokat yang memiliki klien tidak mampu, diharuskan untuk mendaftarkan perkara yang

⁹ Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

ditanganinya. Jika ada advokat anggota PERADI di seluruh Indonesia yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, paling sedikit 50 jam/tahun, yang bersangkutan dapat di ajukan di Dewan Kehormatan PERADI. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini akan menjadi salah satu persyaratan untuk memperpanjang kartu tanda pengenalan advokat.¹⁰

Upaya lainnya dalam meningkatkan kinerja dari Advokat yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin untuk mempersiapkan Advokat yang lebih baik kedepannya. Advokat juga harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat. Jika mentalitas advokat baik, maka tidak akan berdampak pada pelanggaran kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme seorang advokat sangatlah penting untuk penegakan hukum kedepannya. Peningkatan SDM advokat sebagai profesi terhormat yang artinya anggota PERADI juga memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, sehingga disegani oleh mitra penegak hukum yang lain. Ini sebenarnya juga untuk membangun hubungan baik dengan penegak hukum yang lain.

Upaya yang tidak kalah penting untuk penegakan hukum oleh Advokat yang dilakukan secara terus menerus yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui media cetak maupun elektronik, melalui LSM dan Tokoh Masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan hukum dan lainnya.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Djamil Misbach, S.H, M.H. tanggal 22 Maret 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Setiap advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum tidak boleh memungut imbalan atau biaya kepada masyarakat sepeserpun. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merumuskan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”. Advokat sendiri dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus berdasar pada hati nuraninya sebagai bagian dari profesi advokat agar tercipta penegakan hukum yang adil untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar.

Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra

advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsukan identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dana yang juga menjadi salah satu hambatan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu kerap kali terjadi adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.

B. *Saran*

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.
2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat. Bagi Lembaga Bantuan Hukum khususnya PBH PERADI Cabang Makassar diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya demi menarik masyarakat agar dapat dengan suka rela datang kesana meminta bantuan hukum untuk setiap perkara khususnya bantuan hukum Cuma-cuma. Bagi

Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat litigasi dan non litigasi pengadilan*. Bandung : Mandar maju, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah Gofar, *Profesi Advokat bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum dalam Mimbar Hukum*. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3I3, 2007.
- Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Amir Syamsudin, *Menyambut Undang-undang Advokat, peran advokat dalam Pembangunan*. Jakarta, 2002.
- Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*, Majalah Hukum, 2005.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2009.
- Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta Selatan, 2013.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta, 2000
- Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011.
- Harun Hi Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta, 1989.

Hasil Wawancara dengan Jamil Misbach, SH.,MH selaku Direktur Pusat Bantuan Hukum PERADI pada Hari Kamis, 6 November 2014 pukul 16.30

Hasil Wawancara dengan Heriansyah Sobirin, SH.,MH selaku Advokat

Hasil Wawancara dengan Hendra Firmansyah, SH.,MH selaku Advokat

HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM. Press, Malang, 2004.

<http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html> tgl 23 Februari 2018

<http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011/04/kode-etik-advokat.html> tgl 23 Februari 2018

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia> tgl 23 Februari 2018/

Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Undip, Semarang, 2001.

Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Undip, Semarang, 2001.

Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*. Cet. I. Jakarta: Restu Agung, 2002.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

Ismu Gunadi Widodo, *Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum*, 2002

Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010.

Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 2002.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press, Yogyakarta, 2014.

Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari <http://id.wikipedia.or>

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalis, Jakarta, 1983.

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

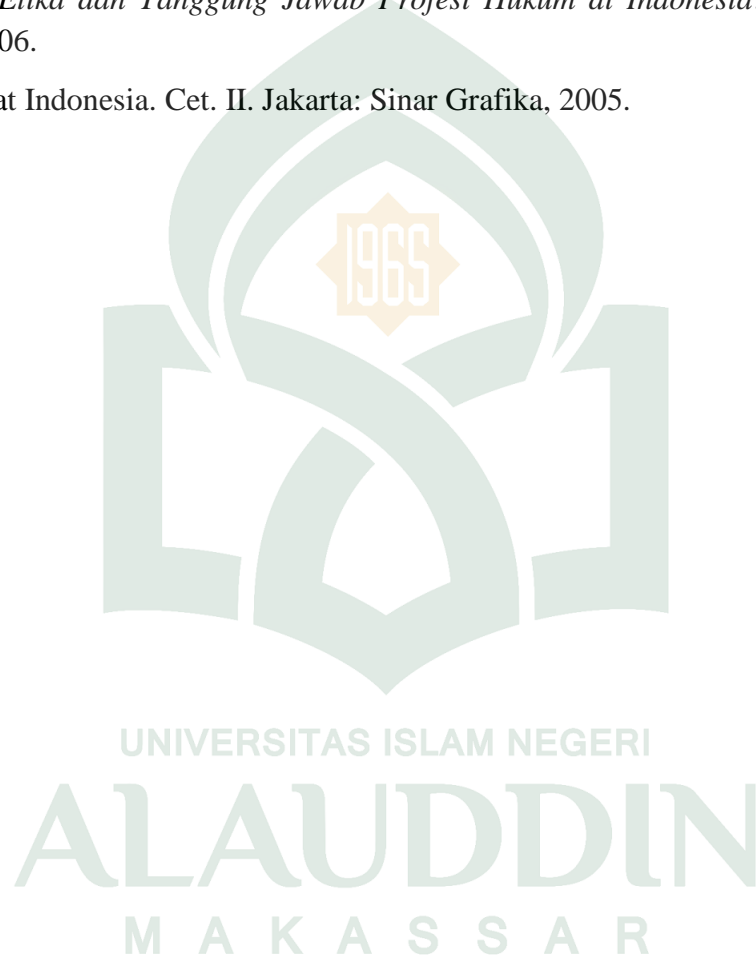
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Suparjo Sujadi, *Law Civilization and Justice*. Editorial Note dalam Law Journal Vol. 3, No. 2, 2001.

Supriadi, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*. Yogyakarta : Arsita, 2001.

Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

UU Advokat Indonesia. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



RIWAYAT HIDUP



NUR FIRMAN, S.H. Di lahirkan di Desa Massamaturu Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 07 Mei 1996. Anak Pertama dari 2 bersaudara. Buah hati pasangan Usman dan Nurlia. Menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2018. Pengalaman Organisasi sejak dibangku kuliah yakni **ILS** (Independent Law Student). Kemudian Menjadi Anggota **MBH** (Mahasiswa Berpendidikan Hukum). Prinsip hidupnya adalah *Phinisi yang tetap jaya dalam badai.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R